

**OPTIMALISASI REPRESENTASI GENDER DALAM PROSES PEMILIHAN
UMUM UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN**

**Dedy Saputra¹, Tania Dwika Putri², Rica Regina Novianty³, Hafis Vivaldi
Akbar⁴, Zahra Fathia⁵, Regi Yusti Ramadhan⁶**

^{1,2,3,4,5}Universitas Hang Tuah Pekanbaru
dedysaputra@htp.ac.id

ABSTRACT

This study examines efforts to optimize gender representation in the electoral process as a strategic step to fulfill women's constitutional rights in Indonesia. The main focus of this research is to identify barriers and opportunities to increase women's participation in legislative and executive institutions. Using a multidisciplinary approach, this research will analyze policies, regulations, and best practices from various countries that have successfully increased women's representation in elections. The research method includes normative juridical analysis and comparative studies, by collecting secondary data from legal sources, literature studies, and previous research reports. Qualitative analysis will be used to interpret the data and find patterns and trends in gender representation in elections. The results of this research are expected to provide concrete and applicable policy recommendations to increase women's representation in elections in Indonesia. In addition, this study also aims to ensure that women's constitutional rights are not only protected but also well-facilitated through more inclusive and gender-sensitive policies. The implementation of these recommendations is expected to support the creation of a fairer and more equitable electoral system, as well as strengthen democracy in Indonesia.

Keywords: *Agreement, Sale and Purchase, Land Ownership Rights, Private Deed*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi representasi gender dalam proses pemilihan umum sebagai langkah strategis untuk memenuhi hak-hak konstitusional perempuan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui pendekatan multidisipliner, penelitian ini akan menganalisis kebijakan, regulasi, serta praktik terbaik dari berbagai negara yang telah berhasil meningkatkan representasi perempuan dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis yuridis normatif dan studi komparatif, dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, studi kepustakaan, serta laporan penelitian sebelumnya. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menginterpretasi data dan menemukan pola serta tren dalam representasi gender di pemilu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional perempuan tidak hanya dilindungi, tetapi juga difasilitasi dengan baik melalui kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pemilu yang lebih adil dan setara, serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan Pemilu, Hak Konstitusional, Komposisi Keterwakilan, Kesetaraan Gender*

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik adalah isu krusial dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil. Representasi perempuan tidak hanya penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan terwakili, tetapi juga untuk memajukan kebijakan publik yang lebih berimbang dan sensitif terhadap isu-isu gender. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Namun, pencapaian representasi gender yang optimal masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Hak konstitusional perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia telah diakui sejak awal kemerdekaan. Namun, implementasi nyata dari hak ini baru mulai mendapatkan perhatian serius pada akhir abad ke-20. Pemilu 1999 menjadi tonggak penting bagi keterwakilan perempuan di Indonesia, dengan diterapkannya kebijakan afirmatif yang memberikan kuota minimal bagi perempuan di lembaga legislatif. Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk melalui perubahan undang-undang dan regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan.

Meskipun demikian, hasil yang dicapai belum sepenuhnya memuaskan. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih di lembaga legislatif masih jauh dari kuota minimal yang ditetapkan. Misalnya, pada Pemilu 2019, meskipun ada kuota 30% bagi perempuan, jumlah perempuan yang berhasil masuk ke DPR hanya sekitar 20,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang harus diatasi untuk mencapai representasi gender yang seimbang dalam politik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan studi komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, studi kebijakan, serta analisis laporan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. **Analisis dokumen** terhadap regulasi dan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu.
2. **Survei dan wawancara** dengan tokoh politik perempuan, aktivis gender, dan ahli hukum.
3. **Focus Group Discussion (FGD)** dengan partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
4. **Analisis statistik deskriptif dan inferensial** untuk mengukur efektivitas kebijakan afirmatif yang telah diterapkan..

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Data menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan, jumlah perempuan yang berhasil masuk ke

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

lembaga legislatif masih jauh dari kuota minimal 30% yang telah ditetapkan. Pada Pemilu 2019, hanya sekitar 20,8% perempuan yang terpilih di DPR. Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, dan minimnya pendidikan politik bagi perempuan.

PEMBAHASAN

Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih dominan di Indonesia sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan menghadapi diskriminasi dan stereotip negatif yang membatasi peluang mereka untuk terjun dalam politik secara lebih aktif. Persepsi bahwa politik adalah dunia laki-laki membuat perempuan kurang mendapat dukungan sosial dalam berpolitik.

Kurangnya Akses terhadap Sumber Daya Politik

Pendanaan kampanye yang terbatas serta minimnya jaringan politik yang mendukung membuat banyak calon legislatif perempuan kesulitan bersaing dengan kandidat laki-laki. Tanpa akses yang setara terhadap sumber daya politik, perempuan cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan suara.

Lemahnya Implementasi Kebijakan Afirmatif

Regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan dalam implementasi kebijakan afirmatif. Kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan membuat kebijakan ini sering kali tidak berjalan efektif. Banyak partai politik yang hanya memasukkan perempuan dalam daftar caleg tanpa memastikan bahwa mereka memiliki peluang nyata untuk menang.

Kurangnya Pendidikan Politik bagi Perempuan

Pendidikan politik bagi perempuan masih belum optimal. Banyak calon legislatif perempuan kurang memiliki kesiapan dalam berkampanye dan berkompetisi secara efektif. Minimnya program pelatihan kepemimpinan dan strategi politik bagi perempuan menjadi salah satu penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Strategi Optimalisasi Representasi Gender

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan strategi optimal seperti: Penguatan regulasi yang lebih tegas dalam memastikan keterwakilan perempuan di pemilu.

1. Pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan agar mereka lebih siap bersaing dalam dunia politik.
2. Dukungan finansial dari partai politik dan kebijakan afirmatif yang lebih konkret untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang setara

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

dalam pemilu.

3. Kampanye kesadaran publik yang diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan, implementasinya masih belum optimal. Dengan mengadopsi strategi yang lebih konkret dan berbasis pada praktik terbaik dari berbagai negara, Indonesia dapat meningkatkan representasi perempuan dalam pemilu dan memastikan pemenuhan hak konstitusional mereka. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga akan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrianty, D. (2015). *Women and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*.
- [2] Budiati, A. (2016). *Quo Vadis Politik Afirmatif bagi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [3] Dewi, K. S. (2018). *Perempuan dan Politik: Kajian tentang Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Handayani, T., & Novianto, A. (2019). *Kebijakan Afirmasi: Analisis Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- [5] Prasetyo, A. (2015). *Hak Konstitusional Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia Malang*: Setara Press.
- [6] Rahayu, M. (2019). *Analisis Efektivitas Kebijakan Afirmasi untuk Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [7] Rahmawati, S. (2020). *Pemberdayaan Perempuan dalam Politik: Implementasi dan Tantangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [8] Routledge. Arifin, E. N., & Ananta, A. (2019). *Demographic Transition and Socioeconomic Development in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.